

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Di setiap daerah di Indonesia memiliki keindahan dan keunikan alam dan budaya yang menakjubkan, sehingga dapat dijadikan karakteristik setiap daerahnya. Dengan kekayaan dan keragaman potensi yang tersedia seharusnya dapat dijadikan modal dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan atau pariwisata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dikutip dari salah satu program Kementerian Pariwisata melalui Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019 dijelaskan bahwa terdapat 10 destinasi pariwisata prioritas yang akan dikembangkan pada tahun 2016. Dari program tersebut, dapat diketahui arah perkembangan pariwisata nasional mengarah pada wisata alam yang kemudian disusul wisata budaya. Menurut (J, Muljadi A., 2009) gerak perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi diantaranya yakni *sustainable tourism development*, *village tourism*, dan *ecotourism* merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan.

Keberadaan desa sebagai komponen terbawah dari struktur ketatanegaraan di Indonesia memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda mulai dari kondisi bentang alam, sosial, budaya, nilai, norma, dan adat-istiadat di setiap desa. Sebenarnya keunikan yang dimiliki setiap desa sangat potensial untuk modal awal pembangunan di tingkat desa. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik yang beragam memiliki 21 kecamatan yang terdiri dari 307 desa/kelurahan. (Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017).

Dewasa ini perkembangan pembangunan ditingkatkan desa mengalami peningkatan, salah satunya melalui pengembangan desa wisata. Perkembangan desa wisata di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang pesat. Hal ini bertujuan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mengacu pada data Pengembangan Desa Wisata Kementerian Pariwisata bahwa terdapat 2.000 desa wisata dari 74.954 jumlah desa di Indonesia terdapat. (Ariani, 2017). Sedangkan berdasarkan data (Dinas Pariwisata Ponorogo, 2017) terdapat 70 desa wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Hal ini turut meningkatkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Maraknya wisata baru yang bermunculan di Kabupaten Ponorogo turut mempengaruhi minat masyarakat untuk menentukan lokasi wisata yang akan dikunjungi. Salah satunya, animo masyarakat yang tinggi terhadap wisata pedesaan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Saat ini masyarakat lebih antusias saat mengunjungi wisata pedesaan yang berbasis wisata alam. Hal ini dikarenakan kejenuhan dan kepenatan akan rutinitas sehari-hari, sehingga masyarakat membutuhkan sesuatu yang dapat menyegarkan kembali sejenak dengan menikmati kesegaran, keindahan panorama alam dipedesaan yang masih terjaga.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Ponorogo sendiri masih belum optimal dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya kepariwisataan bertumpu pada keunikan, kekhasan, dan kelokalan serta keaslian sehingga menempatkan keanekaragaman sebagai suatu hal yang prinsip dan hakiki, maka pengembangan kepariwisataan pada dasarnya untuk kelestarian dan memperkuat jati diri bangsa serta lingkungan alam. (J, Muljadi A., 2009). Sedangkan kenyataan, desa wisata di Kabupaten Ponorogo masih banyak yang meniru wisata dari wilayah lainnya, sehingga belum memiliki keunikan, dan ciri khas kelokalan yang diangkat. Selain itu diperlukanya perhatian yang lebih terhadap kelesatarian alam dan lingkungan guna, menjaga ekosistem yang ada di lokasi wisata.

Mengacu pada Lampiran Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1769/405.29/2017 Tentang Nama-Nama Desa Wisata Sesuai Dengan Potensi Wilayah Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 terdapat 82 wisata alam, 67 wisata religi/budaya dan 15 wisata buatan yang tersebar di 70 desa wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Selain itu berdasarkan program Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo terkait pengembangan desa wisata (bappeda.ponorogo.go.id, 2018) menyampaikan terkait daftar nama desa wisata calon penerima tahun anggaran tahun 2018 didominasi pada pengembangan desa wisata berbasis wisata alam.

Keberadaan aktivitas pengembangan Sendang Beji di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal menjadi daya tarik wisata tersendiri dalam kegiatan desa wisata. Dengan suasana alam yang masih terjaga, mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Desa Kupuk. Pengunjung juga dapat menikmati fasilitas umum yang tersedia di lokasi wisata. Tentunya dalam kegiatan pengembangan desa wisata didukung dengan potensi sosial, budaya, dan potensi desa lainnya.

Disisi lain antusias masyarakat terhadap kunjungan di Desa Pandak, Kecamatan Balong juga terlihat. Hal ini dikarenakan mereka dapat menikmati keindahan pegunungan, pesona alam dan air terjun yang masih terjaga. Selain itu pengunjung dapat menikmati pemandangan alam dari atas bukit maupun rumah pohon yang tersedia. Kegiatan pembangunan fasilitas umum di lokasi wisata juga dapat dinikmati pengunjung.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya aktifitas sekaligus potensi pembangunan dan pengembangan desa wisata di wilayah Kabupaten Ponorogo perlu ditingkatkan lagi dari setiap tahunnya. Hal ini bertujuan lebih menguatkan potensi lokal yang ada di desa, tentunya dengan program yang terencana, terarah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa Kupuk Kecamatan Bungkal dan Pemerintah Desa Pandak Kecamatan Balong Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Desa yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah *“Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Kupuk Kecamatan Bungkal dan Pemerintah Desa Pandak Kecamatan Balong Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Desa ?”*

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal dan Pemerintah Desa Pandak, Kecamatan Balong terkait pengembangan potensi wisata desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pihak-pihak terkait, diantaranya yaitu :

### **1. Pemerintah Desa**

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan dalam pengembangan potensi wisata desa sehingga mampu mempercepat pembangunan di tingkat desa

### **2. Masyarakat**

Dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan tentang strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata desa di Kabupaten Ponorogo. Selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada masyarakat untuk menentukan lokasi wisata di Kabupaten Ponorogo.

### **3. Akademisi**

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam khususnya dalam perkembangan desa wisata di Kabupaten Ponorogo.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Strategi

Menurut George A. Steiner dan John B. Miner mendefinisikan strategi secara khusus bermakna “penempatan” misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. (Miner, 1997)

### 2. Pengembangan

Istilah pengembangan (development) menurut Syafaruddin Alwi cenderung mengarah lebih bersifat formal, diantaranya menyangkutantisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran pengembangan terkait aspek yang lebih luas adalah peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan (unplanned change) atau perubahan yang direncanakan (planned change). (Alwi, 2001)

### 3. Desa Wisata

Desa wisata merupakan Sebuah desa (dusun) dengan keunikan dan atraksi spesifik (alam atau pedesaan berbasis budaya), yang menarik wisatawan untuk mengunjungi desa dan mengembangkan kegiatan ekonomi pariwisata integrasi atraksi, akomodasi , dan fasilitas. (Prayitno)

### 4. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## F. Landasan Teori

### 1. Strategi

Menurut George A. Steiner dan John B. Miner strategi ialah pusat dan inti yang khas dari manajemen strategic. Strategi mengacu pada perumusan tugas, tujuan, dan sasaran organisasi, strategi kebijakan dan program pokok untuk mencapainya, dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa strategi telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi. Kata strategi juga mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Dan sebuah keberhasilan dari strategi biasanya bukanlah keputusan tunggal, tetapi suatu jaringan strategi, substrategi, sub-substrategi, kebijakan dan taktis yang saling berkaitan. (Miner, 1997)

Dalam merancang sebuah strategi menurut (Alwi, 2001) memiliki serangkaian proses formulasi strategi yang juga disebut sebagai perencanaan strategic yang terdiri dari beberapa kegiatan yang sistematis, diantaranya yakni :

#### a. Menetapkan arah strategic organisasi

Sebagai langkah awal pada lingkup menetapkan arah strategic organisasi (*strategic direction*) yang terdiri dari visi, misi dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam organisasi. Keberadaan visi memiliki fungsi sebagai sumber inspirasi dan motivasi yang memiliki nilai intrinsik tertentu, sehingga dalam menyusun visi harus realistis. Di lain sisi dapat dicapai oleh kemampuan-kemampuan dan *recourse* yang terdapat dalam organisasi.

#### b. Mengidentifikasi lingkungan dan analisis SWOT

Perlunya untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan bisnis yang relevan dengan kondisi perusahaan saat ini dan melakukan analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Tidak hanya itu saja juga diperlukannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor lainnya yang termasuk

kompetensi dan keunggulan kompetitif yang dimiliki organisasi.

c. Merumuskan tujuan-tujuan strategic

Pada fase rumusan visi, misi dan tujuan yang dirumuskan pada tingkat korporat atau pada level puncak dalam hierarki manajerial. Selanjutnya tujuan pada tingkat korporat atau organisasi diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan strategic pada tingkat fungsional atau divisional (divisi pemasaran, divisi SDM, dan sebagainya) dan operasional (unit)

d. Mengembangkan alternatif-alternatif strategic

Keberadaan alternatif-alternatif strategic harus dikembangkan untuk selanjutnya dipilih alternatif yang paling mungkin berhasil mencapai tujuan strategic yang diterapkan.

e. Memilih strategic

Pengambilan strategi yang tepat tidak mudah ditentukan, pasalnya harus dilakukan dalam implementasi. Dan jika saat implementasi dijumpai keadaan-keadaan yang tidak terduga sehingga strategi yang diterapkan menjadi kurang efektif untuk pencapaian tujuan, yang kemudian mengharuskan strategi itu direvisi. Maka dari itu, dalam perumusan strategi pada tingkat korporat untuk mengurangi kemungkinan bias dalam konsep intended strategi, para manajer tingkat bawah dapat dilibatkan dalam proses perumusan strategi-strategi yang secara fundamental dikembangkan dari pengalaman yang mereka peroleh di lapangan yang disebut sebagai emergent strategi. Namun demikian dalam proses formulasi strategi manajer puncak harus mampu menetapkan pilihan secara rasional.

Menurut (Alwi, 2001) tentang upaya pada tahapan implementasi strategi secara umum harus sejalan dengan arah strategiknya (*strategic direction*) seperti visi, misi, nilai, dan tujuan. Sedangkan untuk mencapai itu, upaya apapun tidak akan berhasil tanpa adanya

dukungan faktor-faktor struktur, SDM, teknologi, sistem, kultur dan sebagainya. Dan sebuah keberhasilan strategi bukan terletak hanya pada konsep strategi, melainkan terletak pada komitmen dan kemampuan setiap orang yang bertanggung jawab menjalankan strategi.

## 2. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga dijelaskan bahwasanya pemerintah desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Selanjutnya juga dijelaskan terkait kawasan pedesaan yaitu kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan urusan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya kewenangan desa meliputi kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pada hakekatnya pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

## 3. Pengembangan

Menurut (Sammeng, 2001) menjelaskan bahwa istilah pengembangan mengisyaratkan sebuah proses evolusi dengan konotasi arah yang positif atau sekurang-kurangnya memiliki makna "tidak jalan ditempat". Adanya ketidaksamaan interpretasi terjadi, karena istilah pengembangan dapat dikaitkan dengan dua hal yakni "proses" dan "tingkat" perkembangan sesuatu. Dan pengembangan kepariwisataan di Indonesia mencakup multi dimensi, yaitu meliputi

ekonomi, sosial-budaya, politik, dan pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Dalam tahapan melakukan pengembangan yang sebaik-baiknya, maka kata kuncinya adalah

- a. Perencanaan yang menyeluruh dan komprehensif,
- b. Pelaksanaan yang hati-hati,
- c. Dan pengendalian yang ketat dan obyektif.

Pada tahap merencanakan pengembangan pariwisata pada semua tingkat (nasional, daerah dan lokal) sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Dalam upaya menyusun rencana pengembangan pariwisata bagi suatu negara atau daerah yang belum berpengalaman merupakan hal yang tidak mudah, maka negara/ daerah yang bersangkutan biasanya harus meminta bantuan dari luar. Maksud bantuan disini bukan hanya tenaga ahli, tetapi juga pembiayaan, karena penyusunan rencana memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijaksanaan dan sasaran pengembangan pariwisata, sehingga diketahui dengan jelas apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya
2. Mengintegrasikan rencana pengembangan pariwisata ke dalam kebijaksanaan dan sasaran yang lebih luas/menyeluruh, sehingga berbagai sektor yang saling terkait dapat berkoordinasi dengan baik.
3. Menyediakan landasan yang rasional bagi pengambil keputusan di pihak pemerintah dan swasta, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat terkoordinasi dan saling mendukung.
4. Mengoptimalkan dan menyetarakan Manggar ekonomi, sosial dan lingkungan dari pengembangan pariwisata, dan dalam waktu yang sama meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.

5. Memberikan gambaran fisik sebagai pedoman bagi suatu daerah mengenai keperluan : penyediaan prasarana, fasilitas dan pelayanan umum, dan Pengembangan objke atau daya tarik wisata.
6. Meletakkan landasan bagi pelaksanaan yang efektif dari kebijaksanaan dan sarana pengembangan pariwisata.
7. Menyediakan pedoman dan standar baku untuk penyusunan rencana lanjutan yang lebih rinci dan pembuatan desain yang sesuai, sehingga terjamin bahwa setiap komponen saling mendukung dan saling memperkuat
8. Menyediakan perangkat untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus sehingga kegiatan pengembangan dapat diketahui dan dikendalikan sesuai dengan rencana.

Pendekatan perencanaan untuk pengembangan pariwisata dirasakan sangat penting dan mendesak, karena pembangunan pariwisata tergantung pada daya tarik dan kegiatan yang berkaitan dengan keadaan alam, peninggalan sejarah dan warisan seni budaya. Apabila aset-aset tersebut rusak atau terdegradasi, maka wisatawan tidak akan datang berkunjung dan Dnegan demikian pembangunan pariwisata tidak akan berhasil dengan baik. Hal itu terjadi, karena wisatawan pada umumnya tertarik berkunjung ke tempat-tempat yang menarik, bersih, terpelihara, dan tidak terpolusi serta tidak kongesti. Pendekatan perencanaan juga penting untuk menjamin bahwa masyarakat setempat tidak terganggu oleh lingkungan yang rusak dan masalah-masalah sosial. Perencanaan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan mempersyaratkan, bahwa segala sesuatu yang termasuk elemen lingkungan haruslah dengan teliti disurvei, dianalisa dan dipertimbangkan sebelum menentukan tipe tempat yang paling sesuai untuk dikembangkan.

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan, salah satu aspek penting suksesnya pada tahap pelaksanaan pembangunan yang

berkesinambungan adalah pembangunan yang berbasis pada masyarakat (community-based development). Untuk pembangunan pariwisata, pendekatan ini memfokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan jenis pariwisata yang dikembangkan adalah hal-hal yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Implikasinya lebih lanjut adalah jajaran pemerintah dan swasta di tuntut menerapkan cara-cara yang menjamin bahwa manfaat pengembangan pariwisata akan dinikmati oleh masyarakat setempat dan tidak dikuasai oleh pihak luar. Dengan mengoptimalkan manfaat pengembangan pariwisata kepada masyarakat setempat, maka mereka akan memberikan dukungan dan partisipasi yang kuat, termasuk dalam upaya pelestarian aset-aset yang diperlukan (alam dan budaya). Pengembangan pariwisata yang berhasil pada masyarakat harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh empat pertimbangan utama, yaitu

1. Aksesibilitas dengan issue pokok (kenyamanan dan keandalan)
2. Pelestarian lingkungan dengan issue pokok (orientasitas dan keramahan)
3. Kemajuan ekonomi dengan issue pokok (manfaat dan siklus bisnis)
4. Pengelolaan yang berkesinambungan dengan issue pokok (tujuan dan metode)

Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan terdapat unsur-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata yang meliputi :

1. Pengesahan rencana

Setelah suatu rencana disahkan, maka sejak itu rencana termaksud secara legal telah menjadi dasar atau pedoman pengembangan pariwisata. Dan sebaliknya jikalau rencana belum disahkan, tidak ada jaminan bahwa rencana itu akan dilaksanakan.

## 2. Pentahapan program

Pentahapan itu biasanya sudah tercakup dalam struktur rencana yang mencakup berbagai bidang, seperti halnya : pintu gerbang, prasarana, sarana pariwisata, kawasan pariwisata, fasilitas umum dan lain-lain. Dan akan lebih baik apabila dapat dicantumkan pula program lainnya, misalnya program pelestarian lingkungan dan program peningkatan sosial atau yang lainnya.

## 3. Penerapan zona

Diperlukannya penerapan zona untuk memperjelas kawasan/areal pariwisata yang akan dikembangkan yaitu disebut zona pariwisata. Setelah itu zona pariwisata perlu diperjelas mengenai apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dibangun.

## 4. Penerapan standar pengembangan

Keberadaan penerapan standar pengembangan berfungsi untuk memberikan pedoman yang menyeluruh, sehingga pengembangan bermutu, ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya warga di sekitar zona pariwisata. Secara administratif pedoman ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah yang bersangkutan dengan memberikan kepastian tentang standar-standar pembangunan yang harus dipenuhi, guna menjamin terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu diperlukannya pedoman mengenai tatacara penyusunan rencana tapak ( site plan) dan rencana rinci (detail design & engineering).

Tahapan selanjutnya pembiayaan yang menjadi bagian dari faktor penentu bagi pelaksanaan rencana pembangunan pariwisata. Bagaimanapun hebatnya dan baiknya suatu rencana, tetapi tanpa didukung oleh biaya yang memadai, maka rencana itu tidak akan ada artinya. Oleh sebab itu jenis-jenis keperluan pembiayaan dan sumbernya perlu difahami dan ditemu kenali. Pada dasarnya biaya pengembangan pariwisata di suatu negara/daerah dapat

dikelompokkan kedalam empat golongan besar yaitu persiapan, pembangunan prasarana, pembangunan sarana/usaha dan pemantauan.

Kemudian tahap berikutnya yakni pengendalian yang didalamnya tercakup makna pemantauan dan pengawasan haruslah merupakan bagian integral dari rencana dan pelaksanaan pengembangan pariwisata. Pemantauan yang sistematis dan berkesinambungan perlu dilakukan agar secepatnya dapat diketahui apabila terjadi masalah atau penyimpangan. Dengan cepatnya diketahui hal tersebut, pastinya akan dilakukan tindakan penyelesaian atau koreksi yang diperlukan. Dengan demikian bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian atau penyimpangan yang lebih besar.

Dalam melakukan pengendalian itu berbagai hal perlu dipantau. Perkembangan pelaksanaan program, khususnya program kerja atau target tahunan harus berkesinambungan. Jumlah kedatangan dan karakteristik wisatawan perlu dicatat untuk mengetahui apakah sasaran (jumlah dan sumber wisatawan) dapat dicapai atau perlu diadakan revisi/penyesuaian. Bila diperlukan, survey khusus harus dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi wisatawan terhadap produk pariwisata. Adapun tugas pemerintah (pusat atau daerah) dalam mengendalikan pengembangan pariwisata bagi suatu negara/daerah pada dasarnya meliputi berbagai faktor, diantaranya pembangunan, pemasaran, dampak ekonomi, dampak lingkungan (alam dan budaya) dan penegakan hukum.

Terkait dengan pengembangan desa wisata, menurut (Prasiasa, 2017) ada beberapa konsep dasar yang perlu mendapat perhatian, yaitu

1. Desa wisata bukan direncanakan sebagai atraksi wisata semata-mata yang menjadikan manusia dan lingkungan desa tersebut sebagai objek museum untuk ditonton dan dinikmati, melainkan desa wisata sebagai bentuk pemanfaatan usaha pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

serta terjadinya simbiosis mutualisme antara wisatawan dengan masyarakat desa.

2. Desa wisata sebagai sebuah sel hidup, desa akan terkait dengan jaringan yang lebih besar (sistem regional) dan mempunyai berbagai elemen (sub-sistem desa) yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagai sebuah sel, desa harus dijaga kemandiriannya, memiliki batas pertumbuhan dan perkembangan, dan desa tetap terjaga identitasnya
3. Setiap pengembangan program pembangunan di desa, yang dijadikan tolak ukurnya adalah sistem norma, adat, dan budaya setempat. Sistem kelembagaannya juga menggunakan berbagai kelembagaan lokal yang ada di desa, sehingga dapat dihasilkan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat setempat (*community based development*).

#### 5. Desa Wisata

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata menjelaskan definisi Desa Wisata sebagai suatu bentuk integrasi yang terdiri dari atraksi, akomodasi, dan fasilitas penunjang yang diberikan dalam sebuah struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang sudah berlaku.

Menurut (Sastrayuda, 2010) terkait prinsip-prinsip pengelolaan desa wisata antara lain, ialah:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat.
2. Menguntungkan masyarakat setempat
3. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat.
4. Melibatkan masyarakat setempat.
5. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Sedangkan kriteria yang mendasarinya pada desa wisata menurut (Sastrayuda, 2010) antara lain:

1. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata.
2. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
3. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Menurut (Mulyadin, 2001) bahwasanya dalam penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut :

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut gumelar dalam (Supriharjo, 2014) menyebutkan komponen-komponen dalam Desa Wisata diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Keunikan, keaslian, sifat khas
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Menurut (Sastrayuda, 2010) Tujuan pengembangan kawasan desa wisata adalah:

1. Mengenali jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk setempat.
2. Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.
3. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya, dan agar mereka, mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
5. Mengembangkan produk wisata desa.

Adapun sasaran desa wisata menurut (Sastrayuda, 2010) yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Tersusunnya pemodelan kawasan desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan / ramah lingkungan.
2. Memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya.

3. Terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga keselamatan pengunjung.
4. Terwujudnya kawasan desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional.
5. Terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya, masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

#### **G. Definisi Operasional**

Menurut (Sugiyono, 2012) definisi operasional merupakan penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.

Definisi operasional adalah suatu rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu variabel yang menjadi produk penelitian. Dengan adanya definisi operasional, maka peneliti dapat mengetahui batasan indikator atau ukuran dari suatu variabel agar dapat memudahkan dalam mengukur menggunakan teori yang ada. Maka dari itu untuk definisi operasional dalam penelitian ini terkait Strategi Pengembangan Potensi Wisata Desa Di Kabupaten Ponorogo (Studi Penelitian Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Dan Desa Pandak Kecamatan Balong) adalah sebagai berikut :

##### **1. Pengembangan**

- a. Perencanaan yang menyeluruh dan komprehensif.

Adapun dalam tahap ini meliputi dari identifikasi asset atau potensi, pembuatan konsep (master plan), landasan hukum, penyusunan program, dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata.

b. Pelaksanaan yang hati-hati

Dalam tahap ini terdiri dari sosialisasi, peningkatan kompetensi terkait pariwisata (desa wisata), pembiayaan, dan kemitraan.

c. Pengendalian

Untuk pengendalian meliputi dari aspek lingkungan, pembangunan, publikasi, dan pengorganisasian.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan data dalam suatu penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
- b. Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2004)

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2004). Metode deskriptif berarti prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Hadari, 1992)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan dua sumber data yakni sumber primer dan sumber data sekunder :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.(Sugiyono, 2017). Adapun sumber data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan informan yang sudah ditentukan.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.(Moleong, 2004).Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi dengan melakukan wawancara dengan informan dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti sebelumnya. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kupuk, Kepala Desa Pandak, Pj Sekretaris Desa Kupuk, Sekretaris Desa Pandak, dan Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Kupuk dan Pandak.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017). Dan sumber sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, media elektronik dan literature kepusatakaan lainnya.Dan dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi dengan melakukan observasi dan dokumentasi.

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut

dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indra. (Bungin, 2010). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan kondisi lapangan secara langsung lokasi wisata yaitu di Sendang Tunggul Wulung di Desa Kupuk dan Taman Kelinci/Kedung Lesung di Desa Pandak.

Dokumentasi adalah peninggalan tertulismengenai berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu relative belum terlalu lama.Maksud dari peninggalan itu dapat berupa arsip-arsip dan buku-buku, sehingga dsering disamakan dengan studi literature (book survey) atau studi kepustakaan (libraray survey) (Hadari, 1992).Dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini berupa arsip surat penelitian, photo, dokumen Lampiran Keputusan Bupati Ponorogo Tahun 2017 Tentang Nama Desa Wisata Di Wilayah Kabupetan Ponorogo.

#### **4. Teknik Penentuan Informan**

Menurut Lincoln dan Guba dalam (Sugiyono, 2017) untuk menentukan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik dan sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.Maka dari itu teknik penentuan sampel informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2017). Dalam mencari informasi dan data dilokasi penelitian, peneliti menentukan informan diantaranya yakni

- a. Kepala Desa sebanyak 2 orang
- b. Sekretaris Desa Sebanyak 2 orang
- c. Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebanyak 2 orang

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2004) mendefinisikan analisis data kualitatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2004) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam tahapan analisis data model Miles dan Huberman meliputi :

### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

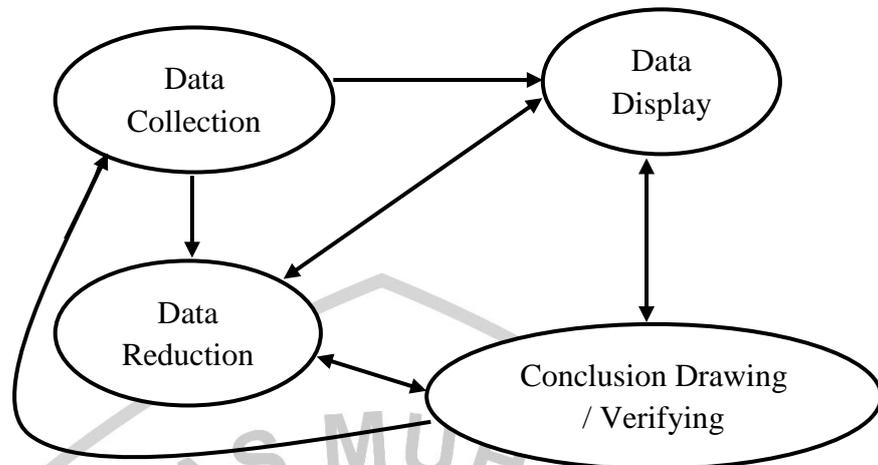
### b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling sering digunakan berupa bentuk teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk teks yang naratif selanjutnya disarankan pada saat melakukan display data juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

### c. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai temua baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

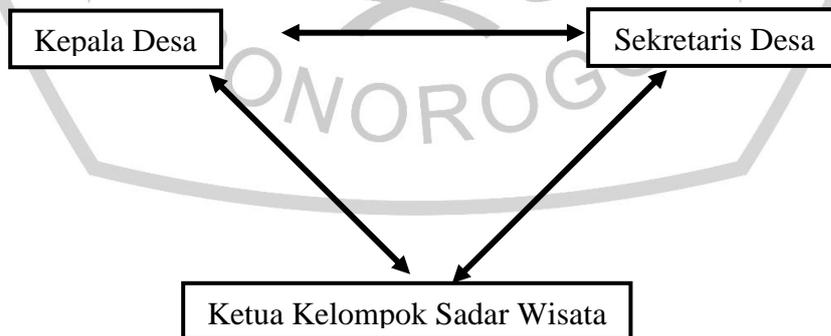
Gambar 1.1. Komponen Dalam Analisis Data Model Miles dan Huberman. (Moleong, 2004)



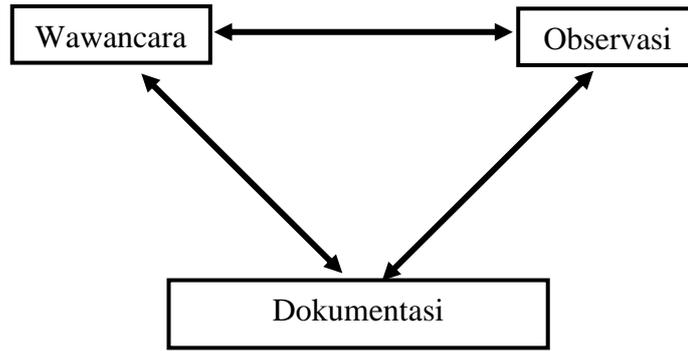
Sumber : (Moleong, 2004)

### 6. Keabsahan Data

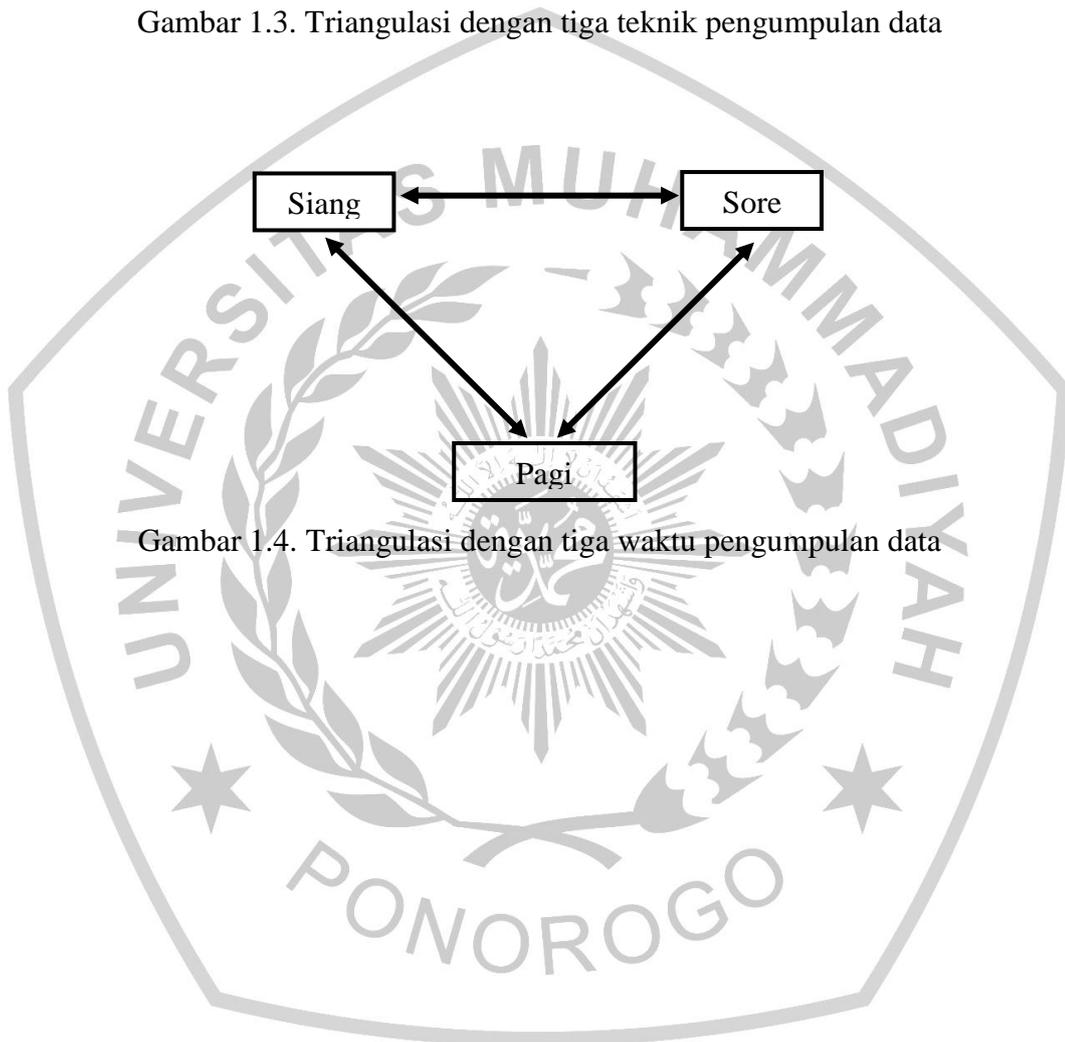
Menurut (Moleong, 2004) Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Sedangkan menurut Wiliam Wiersma dalam (Sugiyono, 2017) mendefinisikan triangulasi sebagai pengujian kredibilitas adalah sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dan dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.



Gambar 1.2. Triangulasi dengan tiga sumber data



Gambar 1.3. Triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data



Gambar 1.4. Triangulasi dengan tiga waktu pengumpulan data